

**ALASAN PENGHAPUS PIDANA BAGI KORBAN YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA KARENA DIPAKSA DALAM UNDANG-UNDANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

Doffi Zanuardi, Dr. Ismail Navianto S.H M.H., Milda Istiqomah S.H MTCP.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: Ipoddoffiz@gmail.com

A. INDONESIA

ABSTRAKSI

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Apakah perbuatan yang dilakukan oleh korban dalam pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat dikategorikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar dan bagaimana perbedaan konsep antara keadaan dipaksa menurut pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan daya paksa menurut pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tujuan penelitian ini untuk menganalisis perbuatan yang dilakukan oleh korban dalam pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat dikategorikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar dan untuk mendeskripsikan perbedaan konsep antara keadaan dipaksa menurut pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan daya paksa menurut pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Normatif. Pendekatan penelitiannya adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konsep. Jenis bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku dan pendapat sarjana hukum, dan bahan hukum tersier yang berupa kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan penelusuran berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan alasan penghapus pidana bagi korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Alasan penghapus pidana merupakan alasan yang dapat menghapuskan hukuman pidana bagi seseorang yang melakukan suatu tindak pidana, alasan tersebut dapat berupa alasan pemaaf atau alasan pembenar. Pasal 18 Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang berisikan mengenai penghapusan pidana bagi seorang korban tindak pidana perdagangan orang ketika korban tersebut melakukan suatu tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Akan tetapi, pasal tersebut belum menjelaskan alasan apa yang menghapuskan hukuman pidana bagi korban, padahal alasan pemaaf dan alasan pembenar mempunyai dasar yang berbeda dalam penghapusan pidana. Oleh karena itu, penulis mengkaji lebih dalam mengenai hal tersebut. Perbedaan konsep antara keadaan dipaksa dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan daya paksa dalam pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana setelah mengetahui jawaban atas permasalahan yang pertama.

Kata Kunci: Alasan Penghapus Pidana, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Perbedaan Konsep.

B. INGGRIS

ABSTRAC

Issues raised in this research is What actions committed by the victim under article 18 of the Law of the Republic of Indonesia Number 21 Year 2007 concerning the Eradication of Trafficking in Persons can be categorized as an excuse or justification and how the difference between the concept of forced circumstances under article 18 of Law -Undang Republic of Indonesia Number 21 Year 2007 on Combating Trafficking Persons with a forced power under section 48 Code of Criminal Law (Criminal Code). The purpose of this study to analyze the actions committed by the victim in article 18 of Law of the Republic of Indonesia Number 21 Year 2007 concerning the Eradication of Trafficking in Persons can be categorized as an excuse or justification, and to describe the difference between the concept of forced circumstances under article 18 of the Law Republic of Indonesia Number 21 Year 2007 on Combating Trafficking Persons with a forced power under section 48 Code of Criminal Law (Criminal Code). The approach used in this research is normative juridical method. Research approach is the approach of legislation, the comparative approach, and the approach to the concept. Types of legal materials in this research is the primary legal materials in the form of legislation, secondary law in the form of books and opinion of legal scholars, and tertiary legal materials in the form of dictionaries and dictionary Indonesian law. Mechanical collection of legal materials in this study is a way to surf the various laws and regulations relating to criminal eraser reason for victims who committed the crime because the law forced eradication of trafficking in persons. Reason criminal eraser is reason to abolish criminal penalties for a person who committed a crime, the reason may be an excuse or justification. Article 18 of Law No. 21 of 2007 on the Eradication of man consists of the elimination of punishment for a crime victims of human trafficking when the

victim committed a crime because they were forced by the perpetrators of human trafficking. However, the article has not explained the reason for what abolish criminal penalties for the victim, but excuses and justifications have a different basis in criminal deletion. Therefore, the authors examine more deeply about it. The difference between the concept of forced circumstances in article 18 of Law No. 21 of 2007 on Combating Trafficking in Persons with a forced power section 48 Code of Criminal Law after knowing the answers to the problems first.

Keywords: Eraser Reason Code, Article 18 of Law No. 21 of 2007 on Combating Trafficking in Persons, Article 48 of the Code of Criminal, Differences concept.

LATAR BELAKANG

Perdagangan orang merupakan salah satu permasalahan besar yang ada di Indonesia untuk saat ini. Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimaksud dengan Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.¹ Salah satu faktor utama penyebab terjadinya perdagangan orang di Indonesia adalah faktor ekonomi.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terdapat kekaburan hukum yang berada di salah satu pasal, yaitu: Pasal 18 yang berbunyi, “Korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang, tidak dipidana”.² Sedangkan penjelasan pasal tersebut menjelaskan sebagai

¹Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

² Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

berikut: “Yang dimaksud dengan “dipaksa” dalam ketentuan ini adalah suatu keadaan di mana seseorang/korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri”. Dalam penjelasan pasal tersebut tidak dijelaskan secara khusus mengenai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang menyebabkan seseorang tidak dapat dipidana. Setiap orang yang melakukan tindak pidana harus bertanggung jawab berdasarkan perbuatannya kecuali Undang-Undang mengatur secara jelas mengenai alasan tidak dapat dipidananya seseorang. Di dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terdapat kekaburan hukum yang berdampak pada tidak adanya kepastian hukum ketika ada kasus yang berkaitan dengan pasal tersebut karena untuk menentukan dipidana atau tidak dapat dipidananya seseorang terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proses pembuktian. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang berkaitan dengan alasan penghapusan pidana yang dapat berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf. Alasan penghapusan pidana membuat korban dari tindak pidana perdagangan orang tidak dapat dipidana ketika dia dipaksa melakukan tindak pidana oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang.

Alasan pembenar atau alasan pemaaf merupakan alasan seseorang tidak dapat dipidana bagi seseorang. Alasan pembenar merupakan alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.³ Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, perbuatan yang dilakukan terdakwa tetap melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.⁴

Korban merupakan seseorang atau masyarakat yang dirugikan karena perbuatan pidana oleh seseorang atau korporasi. Berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan

³ Moeljatno, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm 137.

⁴ *Ibid*, hlm 137.

Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimaksud dengan Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.⁵

Rumusan Masalah

1. Apakah perbuatan yang dilakukan oleh korban dalam pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat dikategorikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar?
2. Bagaimana perbedaan konsep antara keadaan dipaksa menurut pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan daya paksa menurut pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)?

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normative. Penelitian jenis normatif ini akan dikaji lebih mendalam mengenai ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

B. Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan yang mengatur mengenai alasan penghapusan pidana terhadap korban, berupa alasan pemaaf atau alasan pembenar. Dan perbedaan konsep antara keadaan dipaksa dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

⁵ Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Orang dengan daya paksa dalam pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan dilakukan untuk melihat perbedaan konsep antara dipaksa dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Daya Paksa dalam pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

c. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konsep dilakukan untuk menemukan konsep baru berdasarkan rumusan masalah yang ada, sehingga konsep baru itu untuk menentukan alasan penghapus pidana bagi korban yang terdapat dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut menjadi jelas dan kepastian hukum.

C. Jenis Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dan otoritatif. Bahan hukum primer ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang mengatur dan terkait dengan alasan penghapus pidana bagi korban.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum tambahan yang menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku yang khususnya mengenai hukum pidana, asas-asas hukum pidana, tindak pidana perdagangan orang, alasan penghapus pidana, serta viktimologi. Selain itu terdapat pendapat sarjana hukum dan jurnal-jurnal hukum untuk dijadikan sebagai bahan hukum sekunder.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum primer dikumpulkan dengan melakukan penelusuran berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan alasan penghapus pidana bagi korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa. Perbedaan konsep antara keadaan dipaksa dalam Undang-Undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan daya paksa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan di dapat dari Undang-Undang dan dengan cara mengakses menggunakan internet melalui berbagai situs ilmu hukum. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan atau literature dengan teknik mengutip baik secara langsung maupun mengutip ide, atau gagasan yang terdapat dalam sumber aslinya.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan bahan berwujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Dalam hal ini pengolahan bahan dilakukan dengan cara melakukan seleksi bahan hukum sekunder kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis, dan dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian. Disamping itu juga harus dilihat bahwa hubungan itu tidak bersifat teknis, melainkan juga harus dilihat asas yang melandasinya.

Berdasarkan metode interpretasi gramatikal dan interpretasi logis maka dalam memaknai aturan hukum yang ada melalui penalaran hukum untuk diterapkan terhadap teks yang kabur dan kurang jelas.⁶

⁶ *Ibid*, hlm 221.

Selain itu terdapat metode interpretasi komparatif (perbandingan) dengan tujuan membandingkan dua aturan hukum atau lebih digunakan untuk mencari kejelasan mengenai perbedaan dua aturan hukum tersebut.⁷

F. Definisi Konseptual

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan:

1. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
2. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana.
3. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
4. Dipaksa dalam ketentuan ini adalah suatu keadaan di mana seseorang/korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri.

⁷ Johnny Ibrahim, **Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Malang, 2013, hlm 225.

5. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum) yang berkaitan dengan perdagangan orang.

PEMBAHASAN

A. Perbuatan yang dilakukan oleh korban dalam pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat dikategorikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi: “Korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang, tidak dipidana”. Bunyi penjelasan pasal tersebut yaitu: “Yang dimaksud dengan “dipaksa” dalam ketentuan ini adalah suatu keadaan di mana seseorang/korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri”.

Berdasarkan bunyi dan penjelasan pasal tersebut maka penulis dapat menganalisa bentuk alasan pemaaf atau alasan pembenar yang membuat korban tersebut tidak dipidana jika melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Jika seseorang atau korban melakukan tindak pidana kemudian tidak dijatuhi hukuman pidana berarti terdapat dasar hukum dan alasan yang membuat korban tidak dapat dipidana.

Seseorang dapat dijatuhi hukuman pidana apabila ia sudah memenuhi dua rumusan, yaitu: “Perbuatan“ dan “Kesalahan“. Masing-masing rumusan ini terbagi ke dalam beberapa unsur, yang berupa:

1. Perbuatan
 - a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
 - b. Melawan hukum;
 - c. Memenuhi rumusan Undang-Undang;
 - d. Tidak ada alasan pembeda.
2. Kesalahan
 - a. Kemampuan bertanggung jawab;
 - b. Hubungan sikap batin dari pelaku dengan perbuatannya berupa adanya kesengajaan atau kealpaan;
 - c. Tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri pelaku (tidak ada alasan pemaaf).

Seseorang akan dijatuhi hukuman pidana atau pemidanaan maka harus memenuhi dua rumusan tersebut, yang berupa “Perbuatan + Kesalahan = Pemidanaan“. Akan tetapi, di dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa korban tidak dapat dipidana.

Satu alasan dasar yang membuat korban tidak dapat dipidana, diantara dua alasan yang berupa alasan pemaaf atau alasan pembeda sehingga menyebabkan korban tindak pidana perdagangan orang tersebut tidak dipidana jika ia melakukan

tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Menurut Moeljatno, alasan pemaaf adalah alasan dimana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada kesalahan, sedangkan alasan pembenar adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, sehingga yang dilakukan oleh terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar.

Di dalam penjelasan pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tidak dijelaskan secara lengkap dan jelas mengenai arti kata “dipaksa“ itu sendiri. Karena di dalam penjelasannya hanya berbunyi: “Yang dimaksud dengan “dipaksa” dalam ketentuan ini adalah suatu keadaan di mana seseorang/korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri”. Jika korban hanya disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa yaitu berupa tindak pidana dan dia hanya mengikuti perintah dari pelaku tindak pidana perdagangan orang tersebut dengan kehendaknya sendiri maka dia akan tetap dijatuhi hukuman pidana. Akan tetapi, korban dalam hal ini saat melakukan tindak pidana bukan karena kehendaknya sendiri melainkan disuruh oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang jadi tidak dapat dipidana.

Berdasarkan pengertian alasan pemaaf, alasan pemaaf terdiri dari 2 unsur, yaitu:

- 1) Perbuatan yang melawan hukum

Perbuatan dibagi dalam dua bentuk yang berupa perbuatan aktif dan perbuatan pasif. Perbuatan aktif adalah setiap gerakan otot yang dikehendaki dan diadakan

untuk menimbulkan akibat. Sedangkan perbuatan pasif adalah sikap tidak berbuat, dan merupakan sikap fisik yang berdiam diri saja, tidak melakukan gerakan otot untuk melaksanakan gerakan fisik yang diperintahkan oleh Undang-Undang.

Menurut para ahli hukum, jika dalam suatu rumusan tindak pidana tercantum suatu unsur melawan hukum maka pengertian melawan hukum di situ berarti tanpa hak atau tanpa wewenang. Antara lain oleh D. Simons mengatakan bahwa, “menurut anggapan umum, melawan hukum itu mempunyai pengertian tanpa hak sendiri”.

Perbuatan melawan hukum itu dapat berupa suatu tindak pidana. Karena tindak pidana itu merupakan perbuatan yang melanggar perintah atau larangan sepanjang Undang-Undang tidak mengecualikan.

2) Tidak mampu bertanggung jawab

Menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* menjelaskan secara langsung yang dimaksud dengan tidak mampu bertanggung jawab terdiri dari dua hal, yaitu:

- a. Dalam hal pembuat tidak diberi kemerdekaan memilih antara berbuat atau tidak berbuat apa yang oleh undang-undang dilarang atau diperintah (dengan kata lain dalam perbuatan dipaksa);
- b. Dalam hal pembuat ada di dalam suatu keadaan tertentu sehingga ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia tidak mengerti akibat perbuatannya itu (nafsu patologis, gila, pikiran tersesat, dan lain sebagainya).

Di dalam alasan pemaaf seseorang tidak dapat dipidana karena orang tersebut tidak mampu bertanggung jawab. Meskipun perbuatan yang dilakukan orang tersebut tetap merupakan perbuatan pidana.

Berdasarkan pengertian alasan pembenar, alasan pembenar terdiri dari dua unsur, yaitu:

1) Hapusnya sifat melawan hukum

Menurut Memorie van Toelichting, dicantumkannya unsur melawan hukum dalam rumusan beberapa tindak pidana adalah untuk menghadapi kemungkinan jangan sampai orang yang sebenarnya menggunakan haknya dalam melakukan perbuatan itu akan dapat dipidana. Sedangkan menurut para ahli hukum, jika dalam suatu rumusan tindak pidana tercantum suatu unsur melawan hukum maka pengertian melawan hukum di situ berarti tanpa hak atau tanpa wewenang. Antara lain oleh D. Simons mengatakan bahwa, “menurut anggapan umum, melawan hukum itu mempunyai pengertian tanpa hak sendiri”.

Dalam alasan pembenar, sifat melawan hukum ini terhapuskan karena Undang-Undang memberi pengecualian terhadap hal ini. Karena ada alasan-alasan tertentu yang menghapuskan sifat melawan hukum tersebut. Misalnya: melaksanakan ketentuan Undang-Undang dalam pasal 50 KUHP.

2) Dari suatu perbuatan

Perbuatan dibagi dalam dua bentuk yang berupa perbuatan aktif dan perbuatan pasif. Perbuatan aktif adalah setiap gerakan otot yang dikehendaki dan diadakan untuk menimbulkan akibat. Menurut Moeljatno, bukan merupakan perbuatan dalam arti hukum pidana sehingga juga tidak ada tindak pidana dalam hal-hal:

- a. Sikap jasmani yang orangnya sama sekali pasif yaitu tidak dikehendaki olehnya, karena dipaksakan oleh orang, tidak dimasukkan dalam makna kelakuan;

- b. Gerakan reflex tidak dapat dinamakan kelakuan;
- c. Sikap jasmani yang diadakan dalam keadaan tidak sadar (mengigau, berbuat dalam keadaan hypnose, dalam keadaan mabok, dan sebagainya) juga tidak dapat dinamakan kelakuan.

Perbuatan pasif adalah sikap tidak berbuat, dan merupakan sikap fisik yang berdiam diri saja, tidak melakukan gerakan otot untuk melaksanakan gerakan fisik yang diperintahkan oleh Undang-Undang.

Sifat melawan hukum dari suatu perbuatan pidana ini dihapuskan dalam alasan pembenar. Maka perbuatan yang dilakukan oleh seseorang ini merupakan perbuatan yang patut dan benar.

Berdasarkan penjabaran secara lengkap mengenai alasan pemaaf dan alasan pembenar tersebut, maka dapat diketahui bahwa pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan bentuk alasan pemaaf dalam menghapuskan pemidanaan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang ketika melakukan suatu tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Alasan pemaaf yang menghapuskan pemidanaan bagi korban tindak pidana perdagangan orang tersebut berdasarkan hapusnya unsur kesalahan seorang korban tindak pidana perdagangan orang. Korban melakukan suatu perbuatan yaitu tindak pidana akan tetapi korban dalam melakukan tindak pidana terdapat paksaan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang.

Korban tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya meskipun perbuatan yang dilakukan merupakan suatu tindak pidana, karena korban dalam melakukan suatu tindak pidana terdapat unsur paksaan atau dipaksa oleh pelaku

tindak pidana perdagangan orang. Tidak mampu bertanggung jawab karena korban tidak diberi kemerdekaan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk memilih berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang oleh Undang-Undang dilarang atau diperintah. Di dalam penjelasan Memorie van Toelichting (MvT), dipaksa atau paksaan merupakan alasan bagi seseorang tidak mampu bertanggungjawab, sedangkan tidak mampu bertanggungjawab merupakan salah satu unsur yang terdapat di dalam alasan pemaaf.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut merupakan bentuk alasan pemaaf. Unsur tidak mampu bertanggungjawab karena dipaksa merupakan dasar dalam menghapuskan pemidanaan bagi korban tindak pidana perdagangan orang ketika disuruh melakukan suatu tindak pidana oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang tersebut.

B. Perbedaan konsep antara keadaan dipaksa menurut pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan daya paksa menurut pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Perbedaan secara umum antara pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat di dalam tabel berikut.

Tabel 1.1 Perbedaan Secara Umum

No	Pokok Pembahasan	Perbedaan	
		Pasal 18 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007	Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

		Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	(KUHP)
1.	Subjek Hukum	Korban, yang dimaksud dengan korban adalah seseorang baik wanita maupun anak-anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.	Orang, yang dimaksud orang adalah semua orang baik pria maupun wanita dengan segala usia.
2.	Sebab Melakukan Tindak Pidana	Dipaksa, yang dimaksud dengan dipaksa dalam hal ini karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang.	Daya Paksa, yang dimaksud dengan daya paksa dalam hal ini karena pengaruh dari orang lain atau keadaan tertentu.
3.	Sasaran	Terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang korban dari tindak pidana perdagangan orang.	Terhadap suatu tindak pidana umum yang dilakukan oleh seseorang.

Dibawah ini merupakan tabel perbedaan secara khusus mengenai suatu keadaan “dipaksa” dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan suatu pengaruh “daya paksa” dalam pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tabel 1.2 Perbedaan Secara Khusus

No	Pokok Pembahasan	Perbedaan	
		“Dipaksa” (Pasal 18 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)	“Daya Paksa” (Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
1.	Istilah	Suatu keadaan di mana seseorang/korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri.	Suatu keadaan memaksa baik sifatnya fisik maupun psychis yang sedemikian kuatnya menekan seseorang yang tidak dapat dihindarinya sehingga orang itu terpaksa melakukan suatu perbuatan yang pada kenyataannya dilarang Undang-Undang.
2.	Macam-Macam	Suatu peristiwa di mana terdapat paksaan secara psikis atau batin.	1. Peristiwa-peristiwa di mana terdapat paksaan secara fisik; 2. Peristiwa-peristiwa di

			<p>mana terdapat paksaan secara psikis;</p> <p>3. Peristiwa-peristiwa yang biasanya terdapat suatu keadaan di mana terdapat hal sebagai berikut:</p> <p>a) Pertentangan antara kewajiban hukum satu dengan kewajiban hukum lainnya;</p> <p>b) Pertentangan antara kewajiban hukum dengan kepentingan hukum;</p> <p>c) Pertentangan antara kepentingan hukum dengan kepentingan hukum lainnya.</p>
3.	Alasan Penghapus Pidana	Alasan pemaaf.	<p>1. Alasan pembenar;</p> <p>2. Alasan pemaaf.</p>
4.	Dalam Hal Penyertaan	Sebagai perantara (alat) untuk berbuat tindak pidana dari pelaku penyuruh (<i>doenpleger</i>).	<p>1. Sebagai perantara (alat) untuk berbuat tindak pidana dari pelaku penyuruh (<i>doenpleger</i>);</p> <p>2. Sebagai pembantuan (<i>medeplichtige</i>).</p>
5.	Status Subjek Hukum	Dapat dikategorikan sebagai korban dan pelaku tindak pidana.	Hanya dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana.

A. Kesimpulan

1. Alasan penghapus pidana bagi korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah alasan pemaaf. Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan dari korban, karena korban tidak mampu bertanggungjawab akan tetapi perbuatan

korban termasuk dalam perbuatan pidana. Korban tidak dapat dipidana karena korban tidak mampu bertanggungjawab. Tidak mampu bertanggungjawab merupakan salah satu unsur yang ada pada alasan pemaaf. Paksaan yang diterima oleh korban dari pelaku tindak pidana perdagangan orang merupakan suatu hal yang membuat korban tidak mampu bertanggungjawab. Paksaan dapat berupa kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman lain.

2. Perbedaan konsep antara “dipaksa” dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan “daya paksa” dalam pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri dari dua perbedaan besar, yaitu: Perbedaan Secara Umum dan Perbedaan Secara Khusus.

- 1) Perbedaan secara umum merupakan perbedaan yang didasarkan pada bunyi pasal. Pokok pembahasan perbedaan secara umum terdiri dari:
 - a. Subjek Hukum;
 - b. Sebab Melakukan Tindak Pidana;
 - c. Sasaran.
- 2) Perbedaan secara khusus merupakan perbedaan yang didasarkan pada istilah “dipaksa” dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan “daya paksa” dalam pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pokok pembahasan perbedaan secara khusus terdiri dari:
 - a. Istilah;
 - b. Macam-Macam;
 - c. Alasan Penghapus Pidana;
 - d. Dalam Hal Penyertaan;
 - e. Status Subjek Hukum.

B. Saran

Kepada pembuat Undang-Undang yaitu DPR-RI (*legislatif*) dan Presiden beserta Wakil Presiden (*eksekutif*) untuk lebih hati-hati dalam pembuatan Undang-Undang terutama dalam isi pasal, supaya tidak terjadi kekaburan hukum yang

berdampak pada suatu kepastian hukum. Dalam hal adalah pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jika suatu pasal tidak ada kepastian hukumnya membuat aparat penegak hukum bingung dan ragu-ragu dalam penerapan pasal, dalam hal ini dapat merugikan korban tindak pidana perdagangan orang jika korban mengalami kasus sesuai isi pasal tersebut. Karena aparat penegak hukum tidak akan menerapkan suatu pasal jika pasal tersebut mengalami kekaburan hukum. Oleh karena itu, DPR-RI dan Presiden beserta Wakil Presiden dapat merubah atau memperbarui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terutama pasal 18. Aparat penegak hukum atau masyarakat dapat mengajukan *judisial review* mengenai kekaburan hukum yang berada dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Chazawi, Adami. 2011. **Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2**. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Effendi, Erdianto. 2011. **Hukum Pidana Indonesia**. Bandung: Refika Aditama.
- Farhana. 2010. **Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia**. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamdan, M. 2012. **Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus**. Bandung: Refika Aditama.
- Hamzah, Andi. 2010. **Asas-Asas Hukum Pidana**. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ibrahim, Johnny. 2013. **Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil. 2004. **Pokok-Pokok Hukum Pidana Hukum Pidana Untuk Tiap Orang**. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Lamintang, P.A.F. 1997. **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisantris Gutom. 2007. **Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan**. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Maramis, Frans. 2013. **Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia**. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Moeljatno. 2002. **Asas-Asas Hukum Pidana**. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mulyadi, Lilik. 2010. **Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan**. Bandung: Mandar Maju.
- Nuraeny, Henny. 2013. **Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya**. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suarda, I Gede Widhiana. 2012. **Hukum Pidana: Materi Penghapus, Peringatan dan Pemberat Pidana**. Malang: Bayumedia Publishing.
- Sudarto. 1990. **Hukum Pidana I**. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Tongat. 2012. **Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan**. Malang: UMM Press.
- Waluyo, Bambang. 2012. **Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi**. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

C. Kamus

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Kamus Hukum